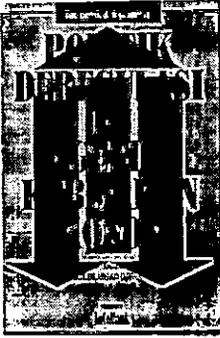


RESENSI BUKU

Kritik Deregulasi Ekonomi



Judul Buku : Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi
Penulis : Dr. Didik J. Rachbini
Penerbit : InfoBank, Jakarta, 1994
Tebal : xxi + 173 halaman

Sejak 1983 pemerintah Indonesia mulai melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi. Kebijakan ini semakin gencar dilakukan menjelang penghujung tahun 1980-an, sebagai langkah untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempertinggi daya saing produk Indonesia di pasar dunia. Hal ini juga dilakukan karena banyak ketentuan dan yang berkaitan dengan perekonomian dianggap tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi nasional, dan juga tidak mendukung perkembangan efisiensi dari aktivitas produksi yang terjadi di tanah air. Sementara itu perkembangan ekonomi dunia juga telah memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada serta tidak menjadi korban dari perkembangan ekonomi dunia yang semakin kompetitif.

Dalam situasi yang demikian, maka mau tidak mau langkah deregulasi dan debirokratisasi itu harus dilakukan. Pada

prinsipnya langkah tersebut berkait dengan upaya pemerintah untuk mengurangi berbagai ketentuan ataupun campur tangan pemerintah yang dapat menghambat jalannya perekonomian. Langkah yang diambil pemerintah ini harus diakui telah memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ekonomi nasional dalam satu dasawarsa terakhir ini. Bank Dunia ataupun lembaga internasional lainnya acapkali memberikan pujian atas keberanian Indonesia untuk melakukan deregulasi. Misalnya saja deregulasi investasi yang dilakukan baru-baru ini dengan dikeluarkannya PP 20/1994 yang sempat menjadi perdebatan nasional.

Buku dari Didik J. Rachbini, seorang ekonom muda yang produktif dan kini aktif di LP3ES, mencoba menganalisis secara umum dan makro kebijakan deregulasi yang diambil pemerintah tersebut, di samping beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Dari kajian yang dilakukannya, ternyata ia mencatat pula dampak negatif dari

deregulasi dan kebijakan ekonomi pemerintah itu. Di samping itu, kebijakan yang ada terasa bias kepada ekonomi kuat dan kurang berdampak pada ekonomi lemah. Secara lugas dikemukakannya bahwa kebijakan deregulasi selama satu dekade terakhir ini masih "menghasilkan persoalan yang tidak dapat ditoleransi, yakni persoalan mendasar dari bidang kehidupan ekonomi itu sendiri, baik masalah kesejahteraan mayoritas masyarakat, disparitas yang tak tuntas diselesaikan, dan sebagainya " (h.15).

Kritik di atas memang tidak bisa dipungkiri. Namun juga harus diakui bahwa berbagai deregulasi dan kebijakan yang diambil pemerintah telah berhasil mengangkat banyak masyarakat dari lembah kemiskinan. Artinya, banyak masyarakat miskin berkembang ekonominya dan naik harkat hidupnya sejalan dengan perkembangan makro ekonomi yang ada. Namun demikian kemajuan yang dialaminya si miskin ini lebih lambat dibanding mereka yang tersentuh langsung deregulasi ekonomi yang ada, sehingga kesenjangan pun semakin tajam. Di samping itu, masih lebih 25 juta penduduk yang masuk golongan papa dan belum terpenuhi kebutuhan pokoknya. Persoalan untuk memperkecil kesenjangan dan menghapuskan kemiskinan secara cepat ini yang sampai sekarang belum mempunyai format deregulasi yang tepat untuk menjawab persoalan tersebut.

Dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dikemukakan salah satu kendala yang dihadapi adalah kekurangan modal. Dari dalam negeri, penulis buku ini melihat dari sumber

perpajakan dan mobilisasi dana swasta merupakan sumber potensial yang masih bisa dikembangkan. Sementara sumber dari luar yang bisa diharapkan dan tidak memperberat beban ekonomi nasional adalah dari penanaman modal asing, sehingga perlu langkah yang bisa merangsang masuknya modal asing tersebut ke Indonesia. (Kebijakan deregulasi, atau bahkan liberalisasi, bidang investasi lewat PP20/1994 tampaknya merupakan jawaban atas seretnya PMA belakangan ini, esh). Namun Didik menambahkan pula agar kita bisa memperoleh nilai lebih dari PMA itu, yakni berupaya mendapatkan perolehan dari transfer teknologi sehingga dapat mematangkan kemampuan sumberdaya manusia yang kita miliki (h. 96)

Buku ini secara ringkas juga mengkaji kebijakan pragmatis jangka pendek (bab VII), yang mengait pada kebijakan fiskal, moneter serta usulan tentang reformasi keuangan daerah. Dari kajian ini dikemukakan bahwa kebijakan yang condong ke sektor moneter ini mengakibatkan terjadinya "ketidakseimbangan ekonomi sebagai akibat perkembangan sektor moneter yang terlalu maju, sehingga respon sistem ekonomi dan sektornya tidak signifikan"

Kebijakan moneter yang terlalu maju ini terkadang tidak diikuti dengan kesiapan yang memadai. Sebagai misal kebijakan lewat Pakto 27/1988 yang telah berdampak pada inflasi yang tinggi serta terjadinya overheating ekonomi nasional. Ini terjadi karena aspek kelembagaan kita sebenarnya belum dipersiapkan secara matang untuk merespon kebijakan moneter tersebut. Ini memberikan pengalaman berharga bagi Kabinet Pembangunan VI, yang

diperkirakan tidak akan mengulangi tindakan serupa. Untuk itu saat ini diperlukan " kebijakan penyesuaian di sektor moneter yang lebih berjangka panjang dengan proses pendalaman yang sinambung, dengan menyertakan berbagai lembaga keuangan. Pematangan lembaga keuangan perlu terus dilakukan, dan peranannya sebagai servant terhadap sektor riil harus berlangsung maksimal" (h. 113)

Yang cukup menarik, penulis buku ini dengan sistematis dan ringkas mengajukan pula beberapa agenda kebijakan ekonomi mendatang, khususnya dalam PJP II. Beberapa agenda kebijakan yang diajukan menyangkut masalah kesenjangan sosial, kependudukan,

kesempatan kerja, serta yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Apa yang dikemukakan bukanlah sesuatu yang baru dan sudah banyak dikemukakan penulis lainnya, namun tetap menjadi refensi yang bermanfaat bagi para pembacanya.

Buku ini memang disusun atas dasar kumpulan makalah yang disampaikan pada berbagai forum, sehingga kesan agak lepas satu sama lainnya masih cukup terasa. Namun demikian, dilihat dari substansi isinya, sebagaimana dikemukakan Dr. Soedradjat Djiwandono yang memberikan pengantar, buku ini akan memberikan manfaat bagi akademisi, perumus kebijakan, para praktisi, maupun masyarakat luas. (Edy S. Hamid)